

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Oleh

RIZKI RAMADHAN

Tahun 2020 di Provinsi Lampung kasus perkawinan pada usia anak meningkat sebesar 2.045,1% atau sebanyak 733 kasus dari 279 kasus pada tahun 2019. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menerapkan Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dari aspek tujuan organisasi, kebijakan organisasi dan aksi utama organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi. Data divalidasi menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Quinn dengan indikator tujuan organisasi, kebijakan organisasi dan aksi utama organisasi. Hasil penelitian ini dilihat dari indikator tujuan organisasi sudah tepat karena tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung telah sesuai dengan visi misi yang diangkat dari turunan visi misi Provinsi Lampung. Kemudian indikator kebijakan organisasi sudah tepat karena telah dilaksanakannya Kebijakan PUP. Sedangkan indikator aksi utama organisasi tidak tepat karena DPPPA Provinsi Lampung hanya sebatas melaksanakan Komitmen Bersama tanpa ada kelanjutannya yaitu pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPA Provinsi Lampung. Di samping itu, DPPPA Provinsi Lampung terdapat beberapa program yang secara tidak langsung berkontribusi dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung. Program tersebut adalah Sekolah Ramah Anak (SRA), Forum Anak Daerah (FAD) dan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi (KesPro).

Kata Kunci: Strategi pemerintah daerah, Pencegahan perkawinan pada usia anak

ABSTRACT

LOCAL GOVERNMENT STRATEGIES IN PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN THE LAMPUNG PROVINCE IN 2022 (Study at the Department of Women's Empowerment and Child Protection of Lampung Province)

By

RIZKI RAMADHAN

The year of 2020 in Lampung Province, cases of child marriage increased by 2,045.1% or 733 cases from 279 cases in 2019. Therefore, Lampung Provincial Government implements the Maturation of Marriage Age (PUP) Policy. This research aims to find out the strategy of the Lampung Province Women's Empowerment and Child Protection Office (DPPPA) in preventing child marriage in Lampung Province in 2022 from the aspects of organisational goals, organisational policies and main organisational actions based on the main tasks and functions of the Lampung Province DPPPA. This type of research is descriptive with a qualitative approach. This data was obtained through the process of interview, observation, and documentation. The validated data used data triangulation techniques. This research uses Quinn's strategy theory with indicators of organisational goals, organisational policies and main actions of the organisation. This research result is seen from the indicators of organisational goals that are appropriate because the main tasks and functions of the DPPPA of Lampung Province are in accordance with the vision and mission raised from the vision and mission of Lampung Province. Then the indicator of organisational policy is appropriate because PUP policy has been implemented. Meanwhile, the indicator of the main action of the organisation is not appropriate because DPPPA Lampung Province is only limited to implementing the Joint Commitment without any follow-up, namely monitoring evaluation and reporting in accordance with the main duties and functions of DPPPA Lampung Province. However, the Lampung Province DPPPA has several programmes that indirectly contribute to the prevention of child marriage in Lampung Province. These programmes are Child Friendly School (SRA), Regional Children Forum (FAD) and Reproductive Health Socialisation (KesPro).

Key Words: Local Government strategies, Prevention of child marriage